

BAB III

PASUKAN PERDAMAIAN PBB DI REPUBLIK DEMOKRASI KONGO (MONUSCO) 2010-2015

Pada Bab ini, penulis akan menjelaskan tentang pasukan perdamaian PBB, MONUSCO atau *Mission De l'Organisation des Nation Unies en Republique Democratic du Congo*. Latar belakang terbentuknya MONUSCO, yang merupakan pengganti dari pasukan sebelumnya yaitu MONUC serta menjelaskan perbedaann dari kedua pasukan tersebut. Kemudian menjelaskan mandat tugas yang diberikan kepada pasukan MONUSCO, lewat keputusan Dewan Keamanan PBB article 1925 dan 2053. Sehingga akan jelas apa wewenang, prioritas, peran, dan tanggung jawab MONUSCO di Republik Demokrasi Kongo.

1. Latar Belakang MONUSCO

MONUSCO atau *Mission De l'Organisation des Nation Unies en Republique Democratic du Congo*, adalah sebutan untuk misi tentara perdamaian dari PBB. Tentara perdamaian ini bergerak berdasar asas *peacekeeping* lewat mandat atau perintah yang diberikan oleh dewan keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB merupakan badan PBB yang anggotanya memiliki tanggungjawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dewan Keamanan PBB ini terdiri dari lima belas negara anggota yang terdaftar sebagai

negara anggota PBB. Negara anggota Dewan Keamanan PBB ini terdiri dari lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap.

Untuk mempertanggungjawabkan fungsinya, Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang besar dalam hal menjaga keamanan dunia. Dewan Keamanan PBB dapat melakukan intervensi terhadap suatu perselisihan jika badan tersebut menganggap peristiwa itu mengganggu perdamaian dan keamanan dunia. Dewan Keamanan PBB akan menawarkan solusi damai terhadap peristiwa tersebut seperti melakukan negosiasi, mediasi, arbitrase, rekonsiliasi, dan usaha lainnya untuk mengakhiri perselisihan secara damai.¹ Namun adakalanya usaha damai gagal, maka Dewan Keamanan PBB berwenang untuk memberikan sanksi ekonomi, komunikasi, atau diplomatik kepada pihak yang bersangkutan.² Bahkan jika diperlukan, Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan kekuatan militer demi menjaga atau mengembalikan perdamaian dan keamanan di daerah tersebut.³

Tidak memihak, atau *impartiality* bukan berarti netral atau abstain. Asas ini lebih merujuk pada aksi rasional yang nantinya diambil oleh pasukan perdamaian bukan atas dasar memihak atau mendukung salah satu pihak yang bertikai. Jadi pasukan perdamaian diperbolehkan bertindak apabila hal tersebut merupakan tindakan rasional, seperti perlindungan warga sipil, operasi penyelamatan, dan sebagainya.

¹ UN Charter, Chapter VI Article 33, Diakses di <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml> pada 4 Juli 2016

² *Ibid*, Chapter VII Article 41

³ *Ibid*, Chapter VII Article 42

Untuk membantu dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan memiliki kekuasaan untuk membentuk badan pendukung. Badan-badan pendukung Dewan Keamanan yaitu:

Komite Kontra-terorisme dan Non-proliferasi

Komite Kontra-Terrorisme (CTC) didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001), yang diadopsi dengan suara bulat pada tanggal 28 September 2001 setelah terjadinya serangan teroris 11 September di Amerika Serikat. Tugas komite ini adalah untuk membantu negara anggota PBB untuk mencegah tindakan teroris baik di dalam wilayah mereka dan antar wilayah. Komite Non-Proliferasi, seperti yang dikenal sebagai Komite 1540, adalah badan tambahan dari Dewan Keamanan yang memiliki tugas utama yaitu proliferasi senjata nuklir, kimia dan biologi dan cara pengirimannya yang merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.⁴

Komite Staf Militer

Komite Staf Militer adalah Dewan Keamanan PBB badan pendukung yang perannya, seperti yang didefinisikan dalam Piagam PBB, adalah untuk merencanakan operasi militer PBB dan membantu dalam pengaturan persenjataan. Tujuan dari Komite Staf Militer dimaksudkan untuk memberikan staf komando untuk satu set angkatan udara kontingen. Kontingen ini disediakan oleh anggota

⁴ <http://www.un.org/en/sc/about/> Diakses pada 4 Juli 2016

tetap Dewan Keamanan (Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) yang disiapkan untuk penggunaan atas kebijaksanaan PBB.⁵

Komite Sanksi

Komite Sanksi dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang memiliki sanksi terhadap keputusannya. Tugas Komite Sanksi adalah untuk memantau pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertentu⁶

Komite Tetap dan Komite Ad Hoc

Komite Tetap dan Komite Ad Hoc yang dibentuk sesuai kebutuhan pada isu tertentu, misalnya Komite Dewan Keamanan tentang Penerimaan Anggota Baru dan Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Resolusi Konflik di Afrika. Komite Dewan Keamanan tentang Penerimaan Anggota Baru memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum dalam hal pendaftaran anggota baru PBB.⁷

Pengadilan Internasional

Dewan Keamanan PBB membentuk pengadilan Internasional untuk melakukan fungsi pengadilan bagi penjahat atau pelaku kejahatan perang maupun kejahatan internasional. Saat ini terdapat dua pengadilan ICYT (Yugoslavia) dan ICTR (Rwanda).

⁵ *ibid*

⁶ *ibid*

⁷ *ibid*

Komisi Pembangunan Perdamaian

Komisi Pembangunan Perdamaian adalah satu-satunya badan penasehat Dewan Keamanan PBB. Komisi ini adalah sebuah badan penasehat antar pemerintah yang mendukung upaya perdamaian di negara-negara berkembang yang berdatang dalam konflik, dan merupakan tambahan kunci untuk kapasitas Masyarakat Internasional dalam agenda perdamaian yang luas. Komisi Pembangunan Perdamaian berperan dalam (1) menyatukan semua aktor yang relevan, termasuk lembaga donor internasional, lembaga keuangan internasional, pemerintah nasional, dan negara yang menyumbang pasukan, (2) sumber daya militer dan (3) memberi saran dan mengusulkan strategi terpadu untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik dan pemulihan dan jika perlu, menyoroti setiap celah yang mengancam untuk merusak perdamaian.⁸

Operasi Perdamaian

Operasi Perdamaian PBB membantu negara yang sedang berada dalam konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian PBB memberikan keamanan dan dukungan pembangunan politik, serta membantu negara-negara untuk mencapai perdamaian dalam masa-masa transisi yang sulit. Saat ini ada 15 operasi penjaga perdamaian, di antaranya The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS), United Nations

⁸ *ibid*

Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dan United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).⁹

Dalam melaksanakan fungsi *peacekeeping* ini, ada tiga prinsip dasar yang harus dijalankan oleh pasukan tersebut berdasarkan Petunjuk Umum Operasi *Peacekeeping* tahun 1995 dan Doktrin Capstone tahun 1998. Prinsip dasar tersebut yakni persetujuan pihak berkonflik, tidak memihak, dan tanpa menggunakan kekerasan.¹⁰

2. Profil MONUSCO

MONUSCO terbentuk dari misi sebelumnya yaitu MONUC pada tanggal 1 Juli 2010 lewat keputusan Dewan Keamanan PBB. Perubahan ini menandakan perubahan fase terhadap konflik yang terjadi di negara Republik Demokrasi Kongo.¹¹

Melalui keputusan Dewan Keamanan PBB, saat awal mula penugasannya MONUSCO memiliki pasukan sebanyak total 22.016 personil yang diterjunkan dan terdiri dari:¹²

- 19.815 personil militer berseragam.
- 760 personil pengamat perang.
- 391 polisi
- 1.050 polisi berseragam.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Abdul Latif dan Ahmad Jamaan, *op. cit*, hal 5-6

¹¹ Website resmi MONUSCO, <http://monusco.unmissions.org/en/facts-and-figures> diakses pada 4 Juli 2016

¹² *Ibid*

Personil – personil ini merupakan tentara dan sukarelawan dari negara – negara anggota PBB, negara – negara yang ikut mengirimkan pasukan adalah: Bangladesh, Belgia, Benin, Bolivia, Brazil, Burkina Faso, Bosnia dan Herzegovina, Kamerun, Kanada, China, Pantai Gading, Rep. Ceko, Mesir, Perancis, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irlandia, Yordania, Kenya, Malawi, Malaysia, Mali, Mongolia, Maroko, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Peru, Polandia, Rumania, Rusia, Senegal, Serbia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Tunisia, Ukraina, UK, Tanzania, USA, Uruguay, Yaman, dan Zambia.¹³

Pada 30 Juli 2015 terjadi pembaruan mandat (resousi 2277) dengan perintah untuk menarik 2000 pasukan MONUSCO, namun tetap menjaga jumlah pasukan diatas 19.815 personil. Sehingga saat ini pasukan MONUSCO terdiri dari:¹⁴

- 18.232 personil militer.
- 462 pengamat perang.
- 1.090 polisi dan polisi berseragam.
- 840 personil sipil.
- 2.725 staf sipil.
- 450 sukarelawan.

Operasi ini sekarang dipimpin oleh Maman Sambou Sidikou (Nigeria) dan David Gressly (USA) sebagai *Special Representative of the Secretary General*.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Mamadou Diallou (Guinea) sebagai Deputi dari *Special Representative of Secretary General*. Lieutenant General Derick Mbuyiselo Mgwebi (South Africa) sebagai Komandan Pasukan. Awale Abdounasir (Djibouti) sebagai Komisioner Polisi. MONUSCO memiliki 8 tempat sebagai basis pasukan dan kantor MONUSCO yang berada di Beni, Bukavu, Bunia, Dungu, Goma, Kalemie, Kisangani, dan Uvira.¹⁵

3. Mandat Tugas MONUSCO

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa MONUSCO masuk dengan menggantikan MONUC yang sebelumnya telah terjun terlebih dahulu. Dengan kata lain, MONUSCO mewarisi mandat yang diberikan pada MONUC. Namun melihat situasi yang ada di Republik Demokrasi Kongo tidak kunjung membaik, MONUSCO mendapatkan pembaharuan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

Menanggapi isu yang ada di Republik Demokrasi Kongo pada saat itu, serta memperhatikan kondisi pada saat itu MONUSCO diterjunkan dengan mandat Dewan Keamanan PBB resolusi 1925 tahun 2010. Resolusi tersebut mengatur tentang misi, peran, prioritas, dan tanggung jawab MONUSCO terkait dengan *peacekeeping* dan menjadi basis terhadap mandat tugas yang dikeluarkan setelahnya. Resolusi Dewan Keamanan nomor 1925 terlampir bersama dengan skripsi ini pada halaman 81:¹⁶

¹⁵ <http://monusco.unmissions.org/en/leadership> diakses pada 11 Juli 2016

¹⁶ UN Security Council, *Resolution 1925*

Seperti yang telah disebutkan, bahwa prioritasnya adalah melindungi warga sipil yang ada di Republik Demokrasi Kongo. Caranya dengan mendukung dan memperkuat militer yang ada di Republik Demokrasi Kongo, termasuk pula untuk reformasi peradilan dan polisi militer.¹⁷ Selain itu MONUSCO melatih FARDC dan lembaga pendukung lainnya.

Reformasi tersebut dilakukan untuk memperkuat Republik Demokrasi Kongo di daerah konflik dan membebaskan Republik Demokrasi Kongo dari kelompok pemberontak bersenjata. Dalam hal kepolisian mandat yang diberikan diantaranya memobilisasi penyediaan peralatan dan dana pelatihan. Sedangkan reformasi peradilan berfokus di pengembangan peradilan pidana (Kepolisian, pengadilan, dan penjara).¹⁸

Berdasar resolusi 1925 tahun 2010, MONUSCO memiliki tugas untuk membantu pemerintah Republik Demokrasi Kongo dalam perlindungan warga sipil. Wewenangnya juga memberikan MONUSCO kebebasan untuk menggunakan segala cara untuk memastikan keamanan warga sipil, personil kemanusiaan, dan pembela hak asasi manusia yang mendapat ancaman kekerasan fisik dan untuk mendukung pemerintah Republik Demokrasi Kongo dalam upaya konsolidasi stabilisasi dan perdamaian di wilayah Republik Demokrasi Kongo.¹⁹

Pada September 2012, dalam ICGLR (*International Conferences of Great Lakes Region*) Uni Afrika dan PBB sepakat untuk menambah 400 orang pasukan

¹⁷ Ismi Ruzan Azzahra, *op. cit*, hal 47

¹⁸ *Ibid*, hal 47-48

¹⁹ Mukiramfi Samba, *Mandate of MONUSCO*, 2012. Hal 19-21

untuk mengamankan dalam upaya menstabilkan wilayah tersebut. Pada Maret 2013, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 2098, yang membentuk otorisasi sebuah Brigade Intervensi dan memperpanjang mandat MONUSCO di Republik Demokrasi Kongo hingga 31 Maret 2014.²⁰

Mandat MONUSCO pada 28 Maret 2014, melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2174, memperpanjang masa operasi MONUSCO hingga 31 Maret 2015. Mandat ini juga mengatur tidak hanya MONUSCO namun juga komponen lainnya seperti Brigade Intervensi, pada tahap tahap tertentu.²¹ Resolusi ini kemudian di perbaharui dan disesuaikan dengan keadaan, sehingga pada saat ini MONUSCO masih berada di Republik Demokrasi Kongo.

4. Peran MONUSCO dalam Konflik di Republik Demokrasi Kongo

Menurut mandat tugasnya, yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB, MONUSCO memiliki tugas serta peran menurut prioritasnya yang akan dipaparkan sebagai berikut :

a. *Protection of Civillians* atau Perlindungan terhadap warga sipil

Menurut mandat dari Dewan Keamanan PBB, MONUSCO memiliki tugas untuk selalu memprioritaskan perlindungan terhadap warga sipil yang ada di Republik Demokrasi Kongo. Seperti yang tertera di Resolusi Dewan Keamanan PBB 1925 pasal 11 :

²⁰ *Ibid*

²¹ <http://monusco.unmissions.org/en/mandate> diakses pada 11 Juli 2016

“11. Emphasizes that the protection of civilians must be given priority in decisions about the use of available capacity and resources and authorizes MONUSCO to use all necessary means, within the limits of its capacity and in the areas where its units are deployed, to carry out its protection mandate as set out in paragraphs 12 (a) to 12 (k) and 12 (t) below;²²”

Yang diterjemahkan sebagai berikut :

“11. Menekankan bahwa perlindungan terhadap warga sipil harus selalu menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan dengan segala cara menggunakan sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki MONUSCO, dalam batasan dan area dimana unit tersebut ditempatkan, untuk melaksanakan mandat perlindungan yang tertera dalam paragraf 12 (a) sampai 12 (k) dan 12 (t) dibawah;”

Untuk memenuhi mandat ini, MONUSCO tidak hanya melindungi warga, personil, aktivis ham, fasilitas, dan instalasi umum dari ancaman fisik saja. Namun juga dengan mempromosikan dan menegakkan perlindungan hak asasi manusia dengan benar yang tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik saja. Melihat kejadian dan kasus yang banyak terjadi di Republik Demokrasi Kongo masalah pencabulan, pemerkosaan, penculikan, dan perbudakan.

Cara lainnya yaitu dengan bekerjasama dengan Pemerintah Republik Demokrasi Kongo dalam program perlindungan warga sipil dan keamanan di Republik Demokrasi Kongo. Dalam hal ini meliputi support terhadap FARDC dalam peningkatan kualitas militer yang ada di Republik Demokrasi Kongo. Pembinaan didalam tubuh polisi militernya juga menjadi cara untuk mendukung perlindungan untuk warga sipil. Ini karena pasukan FARDC banyak yang merupakan integrasi dari pasukan bekas pemberontak, seperti RCD dan MLC.

²² UN Security Council, *Resolution 1925*, Pasal 11

Salah satu langkah yang dilakukan oleh MONUSCO adalah membentuk JPT atau *Joint Protection Team*. JPT merupakan tim perlindungan bersama yang terdiri dari perwakilan PBB, FARDC, dan masyarakat sipil. JPT dibentuk untuk mengumpulkan informasi dan membangun hubungan baik antar aktor aktor kunci dengan masyarakat setempat serta meningkatkan pencegahan dan respon ketahanan untuk perlindungan warga sipil.²³ MONUSCO juga membangun kelompok yang mengatur sistem peringatan dini (*early warning*) dan pemantauan di Kivu utara dan Selatan melalui kerjasama dengan NGO yang bergerak di bidang humaniter yang membantu masyarakat di daerah tersebut.²⁴

Dalam hal perlindungan hak anak anak, MONUSCO telah melakukan beberapa langkah dan cara untuk mencegah maraknya pelanggaran hak hak anak. Namun sulit dilakukan tindakan nyata melihat kenyataan bahwa banyak sekali anak anak yang terafiliasi dengan gerakan pemberontak bersenjata tertentu. Sebagai contoh yang paling banyak adalah dari FDLR dan LRA di Republik Demokrasi Kongo. MONUSCO bekerjasama dengan ICRC, UNICEF, dan NGO dalam repatriasi anak anak yang tergabung dalam kelompok bersenjata ini. Sementara itu MONUSCO tetap mengawasi kesesuaian hukum yang berlaku bagi anak anak ini. Untuk pencegahan, MONUSCO mengadakan pelatihan terhadap

²³ MONUSCO, *Protection on Civilian and Protection Tools*. Diakses pada <http://monusco.unmissions.org/en/protection-civilians-and-protection-tools> 4 Juli 2016

²⁴ Ismi Ruzan Azzahra, *op. cit*, hal 49

CNP atau *Congo National Police*, yang di dalamnya terdapat juga sesi yang membahas perlindungan anak-anak dan hukum tentang anak-anak.²⁵

Pada pemberontakan M23 yang terjadi di Goma, Kivu Utara, pasukan MONUSCO turut andil dalam operasi bersenjata yang dilakukan untuk mendukung FARDC. Setelah terlibat dalam 18 operasi bersenjata yang dilakukan oleh FARDC, pasukan MONUSCO kemudian mundur dari kontak langsung, lalu menetap dan menjaga bandar udara kota Goma sebagai basis perlindungan warga sipil tanpa terlibat langsung dalam pertempuran.²⁶

Pembentukan "*Intervention Brigade*" atau Brigade Intervensi pada Maret 2013 dengan mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2098 tahun 2013. Pasukan ini dibentuk dan dipusatkan di Goma, Kivu Utara, dengan tujuan untuk menetralkan ancaman dari pasukan pemberontak bersenjata yang mengancam otoritas negara dan warga. Pasukan ini berada langsung dibawah MONUSCO dan memiliki mandat yang mengatur mereka untuk aktif selama satu tahun, namun dapat bertambah dan berkurang melihat situasi dan kondisi.²⁷

MONUSCO dan PBB juga bekerjasama dengan kementerian wanita dalam mengkoordinasikan strategi dalam perlindungan dari kekerasan seksual. Pada 15 Juni 2011 Dewan Pendanaan Stabilisasi dan Pendanaan Pemulihan Fasilitas (SRFF) menyetujui alokasi bantuan sebesar US\$5 juta untuk memberantas

²⁵ MONUSCO, *Child Protection Activities*, diakses pada <http://monusco.unmissions.org/en/child-protection-activities> 11 Juli 2016

²⁶ Doddy Yasman, *op. cit*, hal 4

²⁷ <http://monusco.unmissions.org/en/timeline> diakses pada 11 Juli 2016

kekerasan seksual tersebut.²⁸ MONUSCO juga bekerjasama dengan UNFPA dalam pengumpulan data terkait kekerasan seksual yang ada di Republik Demokrasi Kongo.

MONUSCO juga terlibat dalam berbagai macam operasi pemberantasan kelompok bersenjata, penyelamatan, dan perlindungan yang dilakukan oleh FARDC. Seperti yang terakhir pada 2014 di Beni ketika FARDC dan MONUSCO menetralkan ancaman dari ADF-NALU yang bertanggung jawab atas pembunuhan lebih dari 100 orang di Mbau, Kivu Utara.²⁹

b. *Stabilization and Peace Consolidation* atau Stabilisasi dan Konsolidasi Damai Pemerintahan

MONUSCO diperintahkan Dewan Keamanan PBB untuk mengupayakan stabilisasi dan konsolidasi pemerintahan yang damai, hal ini tercantum pula di mandatnya. Perintah ini merupakan hal yang membedakan MONUSCO dengan misi pendahulunya yaitu MONUC. MONUSCO tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk melakukan *peacekeeping* dan *peacemaking*, namun juga *peacebuilding*. Karena itu MONUSCO harus selalu mengambil keputusan yang nantinya akan mendukung keberlangsungan damai yang tidak hanya bersikap sementara.

²⁸ Ismi Ruzan Azzahra, *op. cit*, hal 51

²⁹ Kompas, *Pembantaian di Republik Demokratik Kongo, 100 Tewas*, 2014, diakses pada <http://internasional.kompas.com/read/2014/11/24/21011481/Pembantaian.di.Republik.Demokratik.Kongo.100.Tewas> 11 Juli 2016

PBB lewat MONUSCO bertindak sebagai pendukung dari tentara Republik Demokrasi Kongo sebagai bentuk dari upaya stabilisasi damai yang tidak melanggar asas ketidakberpihakan. PBB lewat MONUSCO juga terlibat dalam upaya negosiasi dan pembicaraan damai antar aktor-aktor yang berkonflik dengan pemerintah Republik Demokrasi Kongo. Namun untuk melakukan konsolidasi pemerintahan yang damai diperlukan situasi damai yang stabil di masyarakat. Untuk mengatasi berbagai isu yang muncul PBB membentuk beberapa komponen yang bekerjasama dengan warga sipil, NGO, dan Pemerintah Republik Demokrasi Kongo itu sendiri. Komponen tersebut antara lain³⁰:

Child Protection Service (CPS), divisi ini mengurus masalah perlindungan anak-anak. Bekerjasama dengan NGO, PBB mempromosikan dan mensosialisasikan hak-hak anak untuk mencegah pelanggaran hak-hak anak. Lalu bersama kepolisian juga turut membangun sistem untuk memproses dan merehabilitasi anak-anak rekrutan perang maupun korban penculikan yang marak terjadi di daerah konflik.³¹

Electoral Division (ED) mengatasi permasalahan dan pemberian bantuan yang selama masa pemilu.³² Republik Demokrasi Kongo telah dua kali melaksanakan pemilu, keduanya berakhir dengan kerusuhan. Bahkan usai pemilu selalu muncul gerakan pemberontakan bersenjata, pada 2006 pemilu Republik Demokrasi Kongo diganggu oleh MLC, lalu usai pemilu 2011 muncul kelompok

³⁰ MONUSCO, *Strategic Approach*, <http://monusco.unmissions.org/en/civil-affairs-activities> diakses pada 12 Juli 2016

³¹ MONUSCO, *MONUSCO Components*, diakses pada <http://monusco.unmissions.org/en/civil-affairs-activities> pada 12 Juli 2016

³² *Ibid*

pemberontak M23. PBB lewat MONUSCO selalu berusaha mengamankan dan menciptakan suasana pemilu yang damai, namun selalu gagal.

Gender Affairs Section (GAS), divisi ini mengatasi isu kesetaraan gender. Dengan bekerjasama dengan Menteri Kewanitaan Republik Demokrasi Kongo, GAS mempromosikan hak hak dan kesetaraan wanita. Divisi ini turut andil pula dalam pembentukan peradilan yang menyangkut kasus kejahatan seksual.³³ Tercatat ratusan kasus dan beberapa kasus pemerkosaan massal yang dilakukan kelompok pemberontak dan tentara yang tidak disiplin di daerah konflik.

UN-Joint Human Rights Office (UNJHRO), bekerjasama dengan warga sipil dan NGO mengurus tentang perihal hak asasi manusia. Tidak hanya mempromosikan, namun juga mendata kasus yang terjadi. Sehingga tim dan kepolisian dapat lebih tanggap dan sigap terhadap masalah tersebut.

Political Affairs Division (PAD) memantau perilaku politik yang terjadi di Republik Demokrasi Kongo. PBB berusaha menciptakan arena berpolitik yang aman di Republik Demokrasi Kongo.³⁴ Di Republik Demokrasi Kongo, partai – partai yang terlibat dalam pemilu banyak yang merupakan kelompok pemberontakan bersenjata seperti RCD, ada juga sebaliknya, kelompok pemberontakan yang menurut perjanjian dirubah menjadi partai politik seperti MLC dan CNDP.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

Public Information Division (PID) divisi ini memfasilitasi kelancaran informasi kepada publik terkait situasi yang ada di Republik Demokrasi Kongo. Bekerjasama dengan Pemerintah dan warga sipil.

Justice Support Section (JSS) membenahi dan mereformasi sistem peradilan di Republik Demokrasi Kongo. Dengan menerapkan ‘*zero tolerance policy*’ yang menjadi asas hukum dari negara tersebut serta merujuk pada yang tercantum dalam mandat.³⁵ Reformasi tidak hanya pada tubuh peradilan sipil saja namun juga peradilan militer, hal ini dikarenakan banyak kasus pelanggaran ham yang dilakukan oleh personil militer yang tidak disiplin, seperti yang terjadi pada pemerkosaan masal di Kivu Utara pada 2010.

Stabilisation Support Unit (SSU), atau divisi yang mensupport proses stabilisasi. Divisi ini memberikan bantuan terhadap pemerintahan Republik Demokrasi Kongo dan MONUSCO dalam kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas politik di Republik Demokrasi Kongo.

³⁵ Abdul Latif dan Ahmad Jamaan, *Loc. cit.*